



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TRIWULAN I TAHUN 2021**

**STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Kata Pengantar

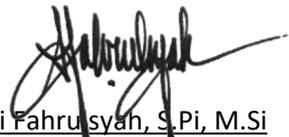
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2021 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan I Tahun 2021 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2021 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 15 April 2021

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrussyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2021, Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP;⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP;⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2021, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 20 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan I Tahun 2021, dari 20 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 9 (sembilan) IKU berstatus Putih (tidak ada skor), IKU berwarna kuning tidak ada, IKU berwarna merah 1 (satu), serta 10 (sepuluh) IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Maret 2021 sebesar **32,49%** atau sebesar Rp **16.918.492.813,-** (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **52.065.525.000,-** (*Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2021.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual.....	4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 - 2024.....	6
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	9
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	111
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	122
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021.....	12
2	
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.....	122
B. Analisis Pencapaian Kinerja	155
1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	Error! Bookmark not defined. 5
2. Sasaran Program 2 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	Error! Bookmark not defined.
3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat..	35
4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	36

5. Sasaran Program 5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Error! Bookmark not defined. 9
6. Sasaran Program 6 : T Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Error! Bookmark not defined.
7. Sasaran Program 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP....	45
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
LAMPIRAN	55

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021	122
Tabel 1. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawa. Error! Bookmark not defined.	6
Tabel 2. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 5. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 6. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 7. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan..... Error! Bookmark not defined.	3
Tabel 8. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Perikasa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat..... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat. Error! Bookmark not defined.	1
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat. Error! Bookmark not defined.	3
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat. Error! Bookmark not defined.	4
Tabel 14. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP TW I Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15. Capaian Cakupan WPP NRI Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	
Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan..... Error! Bookmark not defined.	9
Tabel 16. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”	Error! Bookmark not defined.

Tabel 17. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	520
Tabel 38. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	521
Tabel 49. Capaian IKU “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”	42
Tabel 20. Capaian IKU pada Sasaran Program- 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautandan Perikanan”	43
Tabel 21. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW I Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	46
Tabel 22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI TW I Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	47
Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari–Maret 2021.....	52

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	2
Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	37
Gambar 3. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Error!
Bookmark not defined.4	
Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam

rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka

dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/ 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;

7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2021; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

- A. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- B. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- C. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
- D. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- E. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya,

asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan

3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2021 berjumlah Sasaran Kegiatan (SS) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 20 (Dua Puluh) pada tahun berjalan terdapat perubahan Kebijakan penganggaran dan perencanaan kinerja sehingga PK harus dilakukan penyesuaian. PK hasil revisi pada bulan Februari tahun 2021 karena adanya Revisi Penghematan Anggaran tanpa merubah Jumlah Sasaran Kegiatan ataupun Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan terjadi hanya karena perubahan Anggaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,81
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,11
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP	80

		Belawan (Indeks)	
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (Dua puluh) IKU. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2021 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	PERSENTASI
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	50	100	120
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71	71	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,81	0,27	0,57	120
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed	0,11	0,02	0,0046	23

		Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	0	0	
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	0	0	
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	35	88,89	120
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	10	77,78	120
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80	86,52	108,15
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil	80	80	91,58	114,48

		Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)				
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75	0	0	
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73	0	0	
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90	0	0	
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	0	0	
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	0	0	
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84	84	98,89	117,73
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89	0	0	
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86	0	0	

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor ≥ 100)
2		Hati-hati ($80 \leq \text{Skor} < 100$)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Triwulan I Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: ⁽¹⁾ Presentase Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽²⁾ Presentase Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽³⁾ Presentase Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁴⁾ Presentase Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁵⁾ Presentase Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU **Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan** dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 7.Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW I tahun 2021 IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 50% kepatuhan pelaku usaha. Capaian pada TW I melebihi dari yang ditargetkan yaitu dengan capaian 100% pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya dengan persentase capaian 120%. Jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa pada TW I tahun 2021 sebanyak 15 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa pada TW I Tahun 2021 tersebut lebih banyak bila di bandingkan dengan jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa pada TW I tahun 2020 yaitu sebanyak 8 pelaku usaha.

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pencapaian IKU Presentase pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya pada TW I tahun 2021 tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW I tahun 2020, karena pada TW I tahun 2020 IKU tersebut berupa “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” sementara pada TW I tahun 2021 IKU berupa “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Capaian IKU ke-1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			
	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	PRESENTASE (%)
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	50	100	120%

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 1 pelaku usaha kategori “**Taat**” Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Nelayan di DAS Barumun di sekitar Panai Hulu dan Panai Tengah dan monitoring pelaku pengumpul ikan dilakukan di wilayah Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Labuhan Batu dan BPSPL Padang. Pengawasan dilakukan terhadap nelayan dan pengumpul hasil tangkapan ikan terubuk; - Hasil pengawasan di DAS Barumun berhasil masih menemukan 7 (tujuh) nelayan kecil yang menggunakan kapal motor (pompong) dengan alat penangkapan Jaring Insang (Gill Net) untuk menangkap ikan terubuk, pada kegiatan ini petugas menyampaikan aturan terkait larangan penangkapan ikan Terubuk pada bulan tertentu dengan cara lisan dan membagikan Selebaran (leaflet) serta menghimbau para nelayan untuk mematuhi; - Pengawasan terhadap pelaku usaha pengumpul ikan hasil

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>tangkapan berhasil mewawancarai 2 (dua) orang pelaku usaha yaitu Bapak Junaidi dan Khairul Amin, kedua pelaku usaha pengumpul ikan Terubuk ini telah dilakukan sejak tahun 1980an dengan sarana prasarana yang sederhana, rata-rata ikan Terubuk yang dikumpulkan berjumlah 5 ekor/hari dengan tujuan pemasaran lokal dan Rantau Prapat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut terhadap pelaku usaha pengumpul hasil perikanan, Pengawas - Perikanan menyampaikan sosialisasi mengenai ketentuan larangan penangkapan Terubuk sesuai Kepmen Nomor 43/KEPMEN KP/2016 serta meminta komitmen para pelaku pengumpul untuk mendukung kegiatan tersebut dengan menandatangani surat pernyataan.

Belum ada realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan ini. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan belum ada. Belum adanya realisasi anggaran pada sub iku ini namun capaian sudah 100% di karenakan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Maret 2021 sehingga realisasi anggarannya baru tercatat pada bulan April 2021 (TW II).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 7 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
1	Wisata Bahari CV. Pantai Bali Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata Bahari ini terletak di pinggir Pantai Cermin dengan luasan sebesar kurang lebih 12 Ha. CV. Pantai Bali Lestari berdiri pada tahun 2007 namun sempat tutup dan dibuka kembali tahun 2016 dan dikelola oleh pemilik usaha bernama Bapak Salim. Menurut keterangan bapak Susiandy bahwa CV. Pantai Bali Lestari telah mengelola limbahnya dengan baik dan sudah memiliki dokumen perizinan berusaha, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan urat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 8120110261482 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018 untuk KBLI Karaoke, Taman Rekreasi/Taman Wisata; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Usaha berupa Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dengan Nomor: 8120017271199 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 19 Desember 2018 untuk KBLI Restoran dan Warung Makan.
2	Wisata Bahari Pantai Cermin & Resort Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel dikelola oleh PT Kawasan Wisata Pantai Cermin yang beralamat di Dusun 1, Desa Pantai Cermin Kanam, Pantai Cermin, Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan titik koordinat 3°39'5" LU 98°59'18" BT yang berdiri sejak tahun 2007; - Berdasarkan kegiatan pengawasan wisata bahari yang dilakukan di Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel dapat disimpulkan bahwa Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel belum dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun selama dua tahun berturut-turut dilakukan pengawasan. Namun terkait

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		<p>pengelolaannya Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel dapat dikategorikan sebagai tempat wisata yang ramah lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan tindak lanjut terkait perizinan yang belum dimiliki oleh PT Kawasan Wisata Pantai Cermin.
3	Wisata Bahari Pantai Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat wisata ini berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada koordinat 03°16'5.6" LU - 099° 34'39.38" BT; - Pantai Sejarah belum memiliki izin khusus sebagai tempat wisata. Namun menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5467/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani Cinta Mangrove seluas ± 456 Ha dan Pantai Sejarah berada dalam kawasan ini. Izin pemanfaatan yang diberikan berupa pemanfaatan kawasan, pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi terbatas. - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan.
4	Wisata Bahari Pantai Bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat wisata ini berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada koordinat 03°13'26.5" LU - 099° 34'39.38" BT; - Terkait perizinan pengelolaan kawasan ini masih dalam proses pengurusan; - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan.
5	Pengelolaan Pasir Laut di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Di Pulau Rupert ini pernah ada kelompok masyarakat penambang pasir yang bernama Mitra Usaha Rupert yang diketuai oleh bapak Samrianto, kelompok ini sudah tidak aktif sejak tahun 2018 karena kendala perizinan; - Di pulau rupert ini pernah ada PT penambang pasir ilegal tanpa perizinan dengan nama PT Rupert Jaya Mandiri , PT ini sekarang tidak beroperasi lagi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Dit Pol Airud Daerah Riau; - Di desa ini masih ditemukan 2 titik tempat tumpukan pasir laut milik bapak Nazaruddin pada titik koordinat (01°43'11,94528" LU 101°27'33,45156"BT) dan Bapak Jon Kamisran pada titik koordinat (01°43'28,23456" LU 101°27'46,64052"BT). Pasir laut ini dijual di sekitar Kecamatan Rupert guna memenuhi kebutuhan bangunan masyarakat setempat , pengawas perikanan mengambil tindakan persuasif mengingatkan larangan penambangan pasir laut tanpa

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		<p>perizinan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil wawancara dengan staff kelurahan tanjung kapal tidak adanya pengaduan / keluhan nelayan terhadap dampak hasil tangkapan mereka.
6	Pengawasan BMKT di Kabupaten Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil Pengawasan di titik tenggelamnya kapal, tidak ditemukan adanya, aktivitas pengambilan, penyelaman dan pengangkutan BMKT dan untuk pengawasan di gudang dan lokasi tempat pembongkaran BMKT tidak ditemukan adanya aktivitas yang berhubungan dengan BMKT; - Pada saat ini, tidak ditemukan kegiatan pengangkutan BMKT di sekitar lokasi tenggelamnya kapal oleh PT. FOI (Frankly Ocean Indonesia).
7	Wisata Bahari Pantai Mangrove Kuala Nipah, Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Mangrove di Kuala Nipah, Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang - Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat N 3 35'26. 376 E 99 05'36.2625”; - Wisata Mangrove ini menyuguhkan tempat edukasi ataupun pengenalan tentang tumbuhan pohon mangrove bagi Pengunjung yang datang ke Pantai ini. Seperti yang di ketahui fungsi utama hutan mangrove adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan menahan gelombang besar. Pantai ini sudah ada sejak tahun 2004 yang dikelola oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Jumiati dan anggota kelompok yg lain dengan nama kelompok Koperasi Serba Usaha (KSU) baim bai; - Fasilitas di tempat wisata ini sudah memadai, karena sudah terdapat kantin yang menyediakan makanan hasil laut, pondok dengan harga Rp.20.000 - Rp.50.0000 atau tergantung ukuran pondok, mushola, toilet, area parkir kendaraan, area memancing dan terdapat 3 buah homestay, 1 homestay berisi 1 kasur ukuran sedang dan satu kipas angin, kamar ini muat untuk 4 orang dan juga sudah ada coffe shop; - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Mangrove dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang lengkap dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		lingkungan akibat usaha ini. Dan pemanfaatan Pantai mangrove ini sudah memiliki izin pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4108/MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO-6/2020 Tanggal 29 Juni 2020 dengan luas izin pengelolaannya ±2 Ha, Kelompok mendapatkan izin Selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.

Realisasi anggaran s/d 31 Maret 2021 sebesar Rp.12.133.008,-(20,92%) dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 20,92%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

c. Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pada TW I sub IKU jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada di lakukan pemeriksaan. Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya akan di jadwalkan pada TW II Tahun 2021.

Belum ada realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.44.500.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Sub IKU ini belum ada.

d. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan mencapai 4 pelaku usaha. Rincian jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	PT. Sorby International Medan	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Sorby International Medan berada di Jl. Pulau Irian, Kawasan Industri Medan, Komplek Miel Nusantara I No. 3A. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan ikan beku; - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen perizinan usaha yang diwajibkan dan juga sudah memiliki dokumen perizinan lingkungan; - PT. Sorby International Medan telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM.
2	PT. Bahari Makmur Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bahari Makmur Sejati berada di Jl. Pulau Sumatera No.13 KIM 1. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis vannamei; - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen perizinan usaha yang diwajibkan dan juga sudah memiliki

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>dokumen perizinan lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Bahari Makmur Sejati telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM.
3	PT. Ayu Bumi Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Ayu Bumi Sejati berada di Jl. Medan – Belawan Km. 17,5, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan paha kodok beku. Produk-produk hasil olahan tersebut dipasarkan ke luar negeri terutama yaitu ke Uni Eropa; - PT. Ayu Bumi Sejati telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem pengendapan dan penyaringan yang kemudian dibuang ke Sungai Deli.
4	CV. Na Rahmat	<ul style="list-style-type: none"> - CV. NA RAHMAT beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh, Kel. Gampong Baru, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan titik koordinat latitude 4.960248, longitude 97.772415; - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan beku. Produk-produk hasil olahan tersebut dipasarkan ke lokal dalam negeri; - Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap CV. NA RAHMAT meliputi pengecekan terhadap dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan, manajemen pengelolaan limbahnya, dan juga melihat laporan hasil uji sampel air yang dilakukan terhadap air buangan limbah industri perusahaan; - Air yang digunakan oleh CV. NA RAHMAT untuk keperluan produksinya berasal dari sumur bor. Limbah yang dihasilkan dari proses CV. NA RAHMAT

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>berupa limbah cair yang berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja air pencucian bahan baku. Penanganan limbah di CV. NA RAHMAT dilakukan dengan membuang dan mengalirkan air limbah proses ke parit kemudian ke pelabuhan;</p> <p>- Di dalam menjalankan usahanya, CV. NA RAHMAT belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dikarenakan perusahaan ini berlokasi di kawasan industri PPN IDI. Akan tetapi kawasan industri PPN IDI sendiri belum memiliki IPAL Terpadu., sehingga dapat dikatakan belum melakukan pengolahan limbah yang baik karena limbah tersebut langsung dibuang dialirkan ke pelabuhan. Selain itu, perusahaan ini belum pernah melaksanakan uji laboratorium sample limbah cair hasil aktivitas pengolahan hasil perikananannya</p>

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.500.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 0,66%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 4 pelaku usaha dan anggaran yang digunakan masih rendah yaitu 0,66%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat

disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

e. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Periksa Kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi yaitu 3 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Perikasa Kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	Pengawasan Ekosistem Mangrove di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi yaitu Ekowisata Mangrove Belawan Sicanang yang berada di titik koordinat 3°45'32" LU dan 98°39'2" BT; - Pada tahun 2015, masyarakat kelurahan Belawan Sicanang membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk menetapkan 187 hektar sebagai Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) berbasis masyarakat; - Pengawasan hutan mangrove yang berada di kelurahan Belawan Sicanang, Medan Belawan, telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, setelah diresmikan pada Senin 20 Oktober 2019. - Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap ekosistem hutan bakau di Sicanang, Belawan, diketahui bahwa seluas sekitar 895 Ha merupakan kawasan hutan mangrove , kemudian daerah DPM seluas sekitar 187 Hektar; - Kondisi mangrove di Sicanang tergolong baik.
2	Pengawasan Ekosistem Mangrove Desa Bandar Rahmat, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa titik di kawasan pesisir desa Bandar Rahmat dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan perikanan berupa tambak dan pabrik tepung ikan; - Menurut Sekretaris Kepala Desa Bandar Rahmat, pabrik tepung ikan tersebut bernama CV. Atlantik dan telah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu; - Baik tambak dan pabrik tepung ikan, keduanya saat ini tidak beroperasi disebabkan akses jalan menuju Desa mengalami kerusakan;

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - secara umum wilayah pesisir desa Bandar Rahmat dalam kondisi cukup baik meskipun di beberapa sisi ditemukan pemanfaatan.
3	Pengawasan Ekosistem Mangrove Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai dan Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu :di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai dan Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara; - Di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai ditemukan adanya dapur arang pada posisi 03°4'32.8" LU - 099° 48'38.2" BT. Dapur arang ini sudah tidak beroperasi lagi. Menurut keterangan Kepala Desa, pemilik dapur arang tersebut adalah Kelompok Tani dan Nelayan Mandala. Pengawas Perikanan menemui salah satu pengurus kelompok tersebut yaitu bapak Muhammad Yamin; - Menurut bapak Muhammad Yamin perizinannya dirintis tahun 2013 yang diawali dengan permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan mulai aktif tahun 2018. namun pada akhir tahun 2019 operasional dapur arang dihentikan karena adanya konflik internal antar pengelola; - Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara dilakukan pengawasan terhadap pembangunan tracking mangrove dan pemanfaatan lokasi mangrove yang digunakan sebagai nursery mangrove; - kawasan ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove (izin dari Kemenhut). Kawasan mangrove berada pada koordinat 03°6'56.8" LU - 099° 47'5.1" BT dengan luas sekitar 346 Ha; - Pemanfaatan kawasan mangrove sudah sesuai dengan perizinan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) atau sebesar 5,42%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan 5,42%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

2. Sasaran Program 2: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2021 mencapai 100% dan telah memenuhi target TW I tahun 2021 sebesar 100%. Capaian pada TW I tahun 2021 ini sama bila di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020 yaitu sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024.

Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian	Persentase (%)
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian	Persentase (%)
	Stasiun PSDKP Belawan			
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		100	100	100%

Secara umum, tingginya pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di TW I tahun 2021, dengan melakukan kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara UPT dengan Satuan Pengawas dan Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 10 Berikut:

Tabel 10. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian kapal perikanan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW I Tahun 2021 sebanyak 1.512 unit kapal perikanan, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 15 kapal karena capaian kapal perikanan yang telah sesuai dengan kriteria pada TW I tahun 2020 sebanyak 1.497 unit kapal perikanan.

Berdasarkan tahapan pemeriksaan sesuai dengan Manual IKU, apabila ada kapal perikanan yang tidak laik operasi diberikan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Surat Laik Operasi, sehingga tahapan pemeriksaan berupa pelaporan melalui SIMWASKAN tidak bisa dinilai. Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 100%. Kapal perikanan yang tidak laik operasional pada Tahun 2021 di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42.713.155,- (*Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 8,10 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar RP. 527.000.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 8,10%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan

kepatuhan kapal perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW I Tahun 2021 sebanyak 31 unit usaha UPI, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 21 Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria karena capaian pada tahun TW I tahun 2020 sebanyak 10 unit usaha UPI.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (*Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 0,56% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 242.083.000- (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 0,56%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengolahan hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan.

c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 12 Berikut:

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha Distribusi yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW I Tahun 2021 sebanyak 10 unit usaha Distribusi, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, capaian ini tetap atau sama dengan capaian pada TW I tahun 2020 karena capaian pada TW I tahun 2020 sebanyak 10 Unit usaha Distribusi.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.418.000,- (*Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) atau sebesar 6,93% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 135.857.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggarannya masih sebesar 6,93%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan distribusi hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP

Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan.

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 13 Berikut:

Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,25	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha budidaya yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW I tahun 2021 sebanyak 18 unit usaha budidaya, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 3 Unit usaha Budidaya yang telah sesuai dengan kriteria karena capaian pada TW I tahun 2020 sebanyak 15 Unit usaha Budidaya.

Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 100%. Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan perUndang-Undang di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.014.000,- (*Lima Juta Empat Belas Ribu Rupiah*) atau sebesar 2,73% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 184.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah mencapai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 2,73%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan.

3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat” di identifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase tindak lanjut atas informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**.

Capaian IKU ke-3 “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 71 %. Pada TW I Tahun 2021, belum terdapat informasi pengaduan yang disampaikan oleh POKMASWAS dan ditindaklanjuti, sesuai dengan cara perhitungan Manual IKU pada perencanaan tahun 2021 apabila tidak terdapat informasi/pengaduan dari POKMASWAS maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi dengan demikian Capaian TW I terealisasi yaitu 71 %.

Capaian IKU Ke-3 Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW I pada tahun 2021 dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW I pada tahun 2020. Pada tahun 2020

IKU TW I terealisasi 0% sementara pada TW I tahun 2021 terealisasi sebesar 71%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 0,- (*belum ada penyerapan*) dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan POKMASWAS, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha POKMASWAS di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas sebanyak 61 orang , dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan POKMASWAS.

4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program-4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: IKU ke-4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas; dan IKU ke-5 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*. Adapun capaian dari Sasaran Program-4 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14.Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP TW I Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	1,81	0,27	0,57
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	0,11	0,02	0,0046

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Program-4 Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a. IKU ke-4 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 1,81 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan cakupan laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 ,Hiu 08 dan Hiu 16 pada periode TW I Tahun 2021, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 202 hari operasi dengan dukungan Kapal pengawas sebanyak 3 Unit Kapal, yaitu KP. Hiu 01 ,Hiu 08 dan Hiu 16.

Capaian IKU ke-4 dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I Tahun 2020, karena IKU ini terdapat pada TW I tahun 2020 dengan capaian sebesar 0,35% dan bila dibandingkan dengan Capaian TW I pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,22% dengan capaian 0,57%.

Berdasarkan hari operasi Pada Triwulan I tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 10.977 nm² (*nautica mile*) atau sebesar 0,57% melebihi dari target TW I tahun 2021 yaitu sebesar 0,27%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam) (t)	Kecepatan Dinas (NM/jam) (Y)	Jangkauan Efektif Fladar (NM) (d)	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp.Fkp)	%Cakupan
1	Stasiun PSDKP Belawan	12	Hiu 01	D	49	530	15	15	571	0,20	0,20	4.770,00	0,25%
		13	Hiu 08	D	55	689,66	15	15	571	0,20	0,20	6.206,94	0,32%
		14	Hiu 16	C	0	0	15	18	571	0,20	0,40	0,00	0,00%
<i>Total</i>												10.977	0,57%

Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan Patroli oleh 3 (tiga) unit kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.169.321.689,- atau sebesar 95,83% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.508.668.000,-.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap

realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target pada TW I beserta kegiatan utama dengan didukung realisasi anggaran 12,39%.

b. IKU Ke – 5 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,02 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024.

Apabila di bandingkan dengan Capaian IKU pada TW I tahun 2020, maka capaian pada TW I tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,0006% karena capaian IKU ini pada TW I tahun 2021 sebesar 0,0052%. Penurunan ini diakibatkan karena pada perjalanan kegiatan TW I tahun 2021, Speedboat Dolphin 014 mengalami kerusakan dan harus diperbaiki sehingga kegiatan operasi speedboat terkendala, sedangkan Napoleon 028 sampai TW I tahun 2021 belum beroperasi karena masih rusak dan belum dilakukan perbaikan. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada periode TW I tahun 2021, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 4 hari operasi dengan dukungan Speedboat pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat* yaitu Dolphin 014. Berdasarkan hari operasi pada TW I Tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,0046 % dari Target TW I Tahun 2021 yaitu sebesar 0,02% dengan presentase capaian 23%. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 15.Capaian Cakupan WPP NRI Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*

<i>SPEEDBOAT/ RIB/ RUBBER BOAT</i>	Total Hari Operasi	Cakupan (NM ²)	Cakupan (%)
DOLPHIN 014	4	88	0,0046%
TOTAL Presentase Cakupan			0,0046%

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah belum ada dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.171.530.000,- untuk Dolphin 014 dan Rp.300.010.00 untuk Napoleon 028. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai sesuai target dan realisasi anggarannya masih belum ada.

5. Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” di Identifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU ke 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, IKU ke 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dan IKU ke 8 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” . Adapun capaian dari Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	0	0
3	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	0	0

Penjelasan IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” adalah sebagai berikut:

a. **IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.**

IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada TW I tahun 2021 sebesar 100%. Pembangunan kapal Pengawas tersebut telah di laksanakan sejak tahun 2020 dengan menggunakan sistem Multiyears dan di targetkan selesai 100% pada Bulan Maret 2021. Pada TW I tahun 2021, IKU ini telah tercapai sebesar 100%, dimana pembangunan kapal pengawas kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan telah selesai. Capaian ini di dukung dengan telah di tanda tangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 056/Sta.2/PL.430/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 antara PT. Palindo Marine sebagai penyedia jasa dengan Stasiun PSDKP Belawan sebagai pengguna jasa . IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, karena IKU ini baru ada pada tahun 2021. Adapun capaian dari IKU 6 pada Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2021	Realisasi	Persentase (%)
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.918.891.800,- (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau sebesar 92,88% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.832.600.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama dengan realisasi anggarannya tercapai 92,88%.

b. IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Dalam rangka pencapaian IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) data dukung yaitu: Terselenggaranya pembangunan kantor pengawasan SDKP di Satwas Langsa. Adapun Capaian IKU Ke-7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 98.Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-7 dari Sasaran Program - 5 sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dibangun dibandingkan dengan target kegiatan pembangunan Sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Sarana Pengawasan yang akan di bangun Stasiun PSDKP Belawan adalah pembangunan kantor pengawasan SDKP Satwas Langsa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100%. Pada TW I Tahun 2021 IKU Ke-7 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan bangunan Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- (belum ada realisasi) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.496.563.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

c. **IKU 8 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”**

Capaian IKU Ke-8 ” Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 109.Capaian IKU “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-8 dari Sasaran Program 5 sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan meliputi: Tiga (Tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*).

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW I Tahun 2021 IKU Ke-8 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.220.340,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau sebesar 5,46% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.349.070.000,- (*Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

6. Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program ke 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: (1) IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 20.

Tabel 20. Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	35	88,89
2	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	10	77,78

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program - 6 sebagai berikut:

a. IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Pada TW I tahun 2021 IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki target sebesar 35% dengan capaian pada TW I Tahun 2021 sebesar 88,89% atau realisasi sebesar 120%. Capaian tersebut di dapatkan dari proses administrasi atau pun penyidikan 9 kapal yang di tangkap oleh Stasiun PSDKP Belawan. Adapun ke 9 kapal yang di tangkap oleh Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Data kasus TPKP yang di tangani Stasiun PSDKP Belawan TW I Tahun 2021.

No.	Nama Kapal	Nama Tersangka	Kebangsaan Kapal	Kewarganegaraan Tersangka	Tanggal Tertangkap
1.	KM. PKFB 1845	Baharuddin Lubis	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020
2.	KM. SLFA 5177	Andika	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020

3.	KM. SLFA 5227	Sutikman	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020
4.	KM. SLFA 4107	Taung Htike	Malaysia	Myanmar	24 Januari 2021
5.	KM. SLFA 5165	Rasim	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021
6.	KM. SLFA 5170	Darwis Siregar	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021
7.	KM. KHf 2559	Teht Zin Hein	Malaysia	Myanmar	3 Februari 2021
8.	KM. PKFB 1731	Paidi	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021
9.	KM. PKFB 423	Sutikno	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021

Adapun proses perhitungan pencapaian IKU tersebut adalah seperti pada gambar 3 berikut:

PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021												
IKU PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
No.	Perkara	Jenis Kasus	Rerefensi Nilai Berdasarkan Tahapan							TW I		Capaian TW I
			Gelar Perkara Awal	Sprindik	SPDP	Pemeriksaan	Pengiriman berkas	P21	Tahap II	Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja	
Stasiun PSDKP Belawan												
1	SUTIKMAN (WN Indonesia)	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	88,89
2	BAHARUDIN LUBIS (WN Indonesia)	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
3	ANDIKA (WN Indonesia)	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
4	Thaung Htike / Myanmar	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
5	Mr. Rasim (Indonesia)	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
6	Mr. Darwis Siregar/Indonesia	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
7	Thet Zin Hein/ Myanmar	TPP	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	
8	PAidi/Indonesia	TPP	5	35	50	80	95	98	100	SPDP	50	
9	Sutiknoi/Indonesia	TPP	5	35	50	80	95	98	100	SPDP	50	

Gambar 2. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW I tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. Realisasi atau sebesar Rp.0,- dari total anggaran Rp. 442.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%.

b. IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pada TW I tahun 2021 IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) memiliki target 10% dengan capaian sebesar 77,78% atau realisasi 120%.

IKU ke-10 tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW I tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.6.172.800,- dari total anggaran Rp.336.640.000,-

7. Sasaran Program - 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program- 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6)Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (8) Persebtase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (9)Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan); (10) Nilai I Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program 7 sebagai berikut:

(1) IKU 11 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pemenuhan Dokumen Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada TW I Tahun 2021 terealisasi dengan nilai indeks sebesar 86,52 atau 108,15% dari target tahun TW I tahun 2021 yaitu dengan nilai Indeks 80. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada Semester I

Tahun 2020. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW I Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat di lihat pada tabel 21 berikut

Tabel 21. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW I Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,212
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,288
U3	Waktu Pelayanan	3,462
U4	Biaya / Tarif	3,981
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,192
U6	Kompetensi Pelaksana	3,173
U7	Perilaku Pelaksana	3,221
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,846
U9	Sarana dan Prasarana	3,846
Nilai Indeks		3,461
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		86,52

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan terealisasi dengan nilai indeks sebesar 86,52.

(2) IKU 12 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-12 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna LVHPI pada Triwulan I Tahun 2021 tercapai 91,58 dari target yang telah ditetapkan pada TW I tahun 2021 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 114,48%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada Tahun 2021. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel 22 berikut:

Tabel 22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI TW I Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,60
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,50
U3	Waktu Penyelesaian	3,70
U4	Biaya / Tarif	4,00
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,70
U6	Kompetensi Pelaksana	3,70
U7	Perilaku Pelaksana	3,60
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,50
U9	Sarana dan Prasarana	4,00
Nilai Indeks		3,663
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		91,58

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU LVHPI belum terealisasi.

(3) Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan

Penilaian untuk IKU Ke-13 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada periode TW I tahun 2021 IKU ke-13 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada TW IV tahun 2021.

(4) IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *assessment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *fingger print*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor. IKU Ke-14 diukur per semester yaitu dengan perhitungan pada Semester I dengan target 65 dan Semester II dengan target 73 pada tahun 2021.

(5) IKU ke-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90, IKU ini merupakan IKU baru yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pada TW I tahun 2021 IKU ke-15 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 90.

(6) IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
 - 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 - 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
 - 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
 - 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
- Capaian kinerja untuk IKU Ke-15 pada periode TW I tahun 2021 belum dapat diukur/ dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2021 dengan target nilai 72,5 %.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.15.466.516,- atau sebesar 18,67% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 82.850.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini akan tercapai 100% pada akhir tahun 2021 sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggarannya s.d TW I yaitu sebesar 18,67%.

(7) IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan%

IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

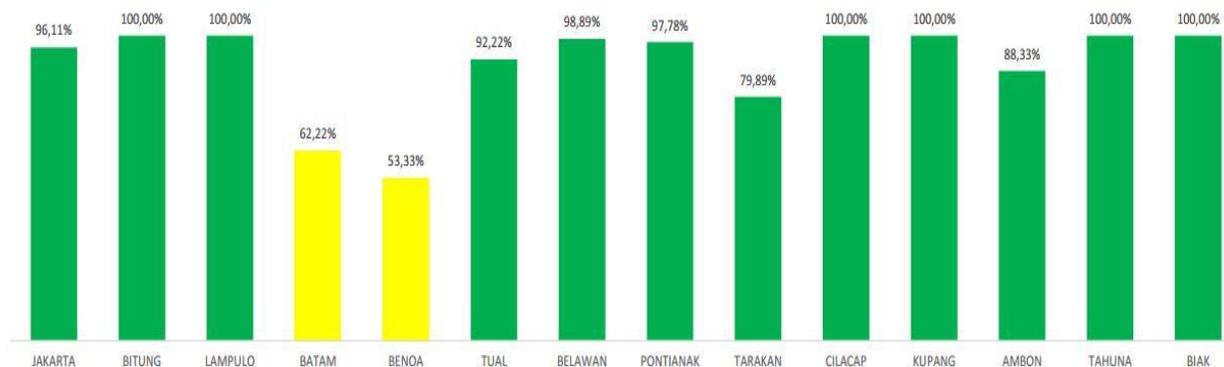
- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian kinerja untuk IKU Ke-17 pada periode TW I tahun 2021 belum dapat diukur/ dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2021 dengan target nilai 72,5 %.

(8) IKU Ke-18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 84% pertriwulan pada tahun 2021. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan I tahun 2021 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW I sebesar 98,89% melebihi dari target yang di tetapkan pada TW I yaitu sebesar 84%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW I tahun 2020, IKU Ke-18 ini tidak mengalami penurunan sebesar 1,11% dengan capaian sebesar 100% baik pada TW I tahun 2020. Penurunan persentase capaian tersebut terjadi pada item Keikutsertaan, dimana pada TW I tahun 2021 nilai keikutsertaan Stasiun PSDKP Belawan sebesar 94,44% sedangkan pada TW I tahun 2020, nilai keikutsertaan nya mencapai nilai 100%. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat diliha pada gambar 4 berikut:



Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(9) IKU Ke-19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I Tahun 2021 **tidak dapat dihitug karena masih adanya data validasi oleh Biro Keuangan KKP terkait jumlah satker yang ada di lingkup KKP**. IKU ke-19 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2020, karena pada TW I tahun 2020 capaiannya 74,62% sementara pada TW I tahun 2021 IKU ini tidak di lakukan penghitungan.

IKU ke-19 akan dilakukan pengukuran pada tiap semester, dengan target yang ditetapkan pada Semester I sebesar 80% dan Semester II sebesar 89% pada tahun 2021.

(10) IKU Ke-20 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

IKU ke-20 pada periode TW I tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada TW I tahun 2020, kaena IKU ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. IKU ini akan diukur kinerjanya pada TW IV tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86.

Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2021 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 13 November 2020, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 52.078.585.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada tanggal 16 Februari 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi menjadi Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 16 Februari 2021. Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan I 2021 sebesar 32,49 % atau sebesar Rp 16.918.492.813,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2021

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	37.671.041.000	14.380.433.829	38,17
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	882.640.000	36.553.723	4,14
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	267.000.000	18.216.008	6,82
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.088.940.000	58.495.155	5,37
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	12.155.904.000	2.424.794.098	19,95
Jumlah		52.065.525.000	16.918.492.813	32,49

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2021 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2021, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
5. Melakukan perbaikan pada speedboat Napoleon 028 agar target kegiatan cakupan WPP NRI yang di pantau menggunakan speedboat bisa tercapai.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
4. Mengajukan permohonan review terkait pengajuan lelang untuk perbaikan speedboat Napoleon 028 ke Inspektorat Jenderal.